

Pemetaan Sosial dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berkelanjutan: Studi Desa Srigonco, Malang

Didit Puji Leksono¹, Vivi Sylvia Purborini², Ida Bagus Suryanatha³, Yorgen Kaharap⁴, Puput Iswandyah Raysharie⁵

¹ Pemerintah Desa Srigonco, Indonesia; kkirun685@gmail.com

² Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia; velioraps1@gmail.com

³ Universitas Palangka Raya, Indonesia; bagusnatha11@fisip.upr.ac.id

⁴ Universitas Palangka Raya, Indonesia; yorgen@fisip.upr.ac.id

⁵ Universitas Palangka Raya, Indonesia; raysharie@feb.upr.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Social mapping;
Development Planning;
Sustainable Villages

Article history:

Received 2025-10-14

Revised 2025-11-24

Accepted 2025-12-09

ABSTRACT

Social mapping is a crucial instrument in village development planning based on the real conditions of the community. This study aims to describe the results of social mapping as the basis for sustainable village development planning in Srigonco Village, Malang Regency. This research employed a qualitative approach using in-depth interviews with 42 respondents consisting of village leaders and community members. Social mapping was conducted based on nine pillars, namely socio-cultural, socio-economic, education, health, law, community empowerment, entrepreneurship (MSMEs), women-children-disabilities, as well as environment and infrastructure. The findings indicate that Srigonco Village has considerable potential in the agricultural, livestock, fisheries, tourism, and MSME sectors; however, these potentials have not been optimally managed due to limited human resource capacity, weak village economic institutions, low legal awareness, and the suboptimal role of the Village-Owned Enterprise (BUMDes). In addition, disparities in access to education, limited empowerment of women and vulnerable groups, and the lack of integrated management of the environment and village infrastructure remain significant challenges. Based on the SWOT analysis, the main strengths of the village lie in community openness and strong support from the village government for change, while the major challenges include low economic welfare and limited community capacity. This social mapping serves as a foundational basis for formulating sustainable village development strategies oriented toward strengthening human resources, optimizing local potential, reinforcing MSMEs, and improving participatory-based village governance.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Didit Puji Leksono

Pemerintah Desa Srigonco, Indonesia; kkirun685@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional, khususnya dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prinsip partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Namun, dalam praktiknya, banyak program pembangunan desa masih menghadapi permasalahan mendasar, seperti lemahnya akurasi data sosial, rendahnya partisipasi masyarakat, serta perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis pada kondisi riil lapangan (Bappenas, 2020; Kementerian Desa PDTT, 2021).

Pembangunan desa berkelanjutan menuntut adanya pendekatan perencanaan yang berbasis bukti (*evidence-based planning*), partisipatif, dan kontekstual. Salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah pemetaan sosial (*social mapping*). Menurut Adi (2019), pemetaan sosial merupakan suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi struktur sosial, relasi sosial, permasalahan, serta potensi masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Pendekatan ini memungkinkan perencana pembangunan untuk memahami secara lebih komprehensif kondisi sosial masyarakat sebelum merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Chambers (2017) menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang tidak didasarkan pada pemahaman sosial yang kuat cenderung menghasilkan program yang tidak berkelanjutan dan kurang berdampak nyata.

Pemetaan sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data, tetapi juga sebagai media penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Mardikanto dan Soebiato (2017) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pemetaan sosial dapat meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program pembangunan serta memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal. Sejalan dengan itu, Suharto (2018) menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.

Desa Srignonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Letak geografis desa yang berada pada jalur strategis menuju kawasan wisata Pantai Balekambang memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa potensi tersebut belum dikelola secara optimal akibat keterbatasan kualitas sumber daya manusia, lemahnya kelembagaan ekonomi desa, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Selain berbagai tantangan di sektor ekonomi, Desa Srignonco juga menghadapi persoalan pada sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan. Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, keterbatasan akses terhadap program pemberdayaan bagi perempuan dan penyandang disabilitas, serta persoalan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan menunjukkan bahwa pembangunan desa memerlukan perencanaan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan temuan Todaro dan Smith (2020) yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan menuntut integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemetaan sosial menjadi sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan desa berkelanjutan di Desa Srignonco. Pemetaan sosial dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan sembilan pilar, yaitu sosial budaya, sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan (UMKM), perempuan-anak-disabilitas, serta lingkungan dan infrastruktur. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh gambaran yang utuh mengenai potensi, permasalahan, serta kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam merumuskan strategi pembangunan desa yang lebih tepat sasaran, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pemetaan sosial sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan desa berkelanjutan di Desa Srignonco, Kabupaten Malang. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa, pemangku kepentingan, serta akademisi dalam merancang program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih efektif dan berorientasi pada potensi lokal.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi sosial masyarakat, potensi desa, serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan desa berkelanjutan di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara komprehensif berdasarkan perspektif, pengalaman, serta dinamika yang berkembang di tengah masyarakat (Creswell, 2018; Moleong, 2021). Penelitian ini bersifat deskriptif karena berfokus pada pemaparan fakta-fakta empiris hasil pemetaan sosial tanpa melakukan perlakuan atau eksperimen terhadap objek penelitian.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2025 dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Srigonco. Subjek penelitian berjumlah 42 orang informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, petani, nelayan, kelompok perempuan, serta perwakilan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Pemilihan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran sosial yang representatif dari berbagai lapisan masyarakat (Sugiyono, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai kondisi sosial budaya, sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan (UMKM), perempuan dan disabilitas, serta lingkungan dan infrastruktur desa. Teknik wawancara ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih kaya, mendalam, dan kontekstual sesuai dengan pengalaman langsung masyarakat (Kvale & Brinkmann, 2018). Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas masyarakat, kondisi lingkungan, infrastruktur, serta interaksi sosial yang terjadi di desa sebagai upaya memperkuat dan memverifikasi hasil wawancara. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen desa, profil desa, laporan kegiatan, serta foto-foto lapangan sebagai data pendukung.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data hasil wawancara dan observasi terlebih dahulu diseleksi, dikelompokkan, dan difokuskan sesuai dengan tema-tema utama berdasarkan sembilan pilar pemetaan sosial. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola hubungan antar fenomena sosial. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.

Selain analisis kualitatif, penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam perencanaan pembangunan desa berkelanjutan. Analisis ini digunakan untuk merumuskan arah strategi pembangunan desa yang berbasis pada kondisi objektif hasil pemetaan sosial (Rangkuti, 2018).

Pemetaan sosial dalam penelitian ini difokuskan pada sembilan pilar utama, yaitu sosial budaya, sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan (UMKM), perempuan-anak-disabilitas, serta lingkungan dan infrastruktur. Kesembilan pilar tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi pembangunan desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini

digunakan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian sehingga hasil pemetaan sosial benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moleong, 2021; Creswell, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilar Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Srigonco masih menunjukkan karakter masyarakat pedesaan yang kuat dengan nilai-nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan kekeluargaan yang relatif terjaga. Tradisi kerja bakti, musyawarah desa, serta kegiatan keagamaan masih menjadi ruang utama interaksi sosial masyarakat. Modal sosial ini menjadi kekuatan penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan desa berbasis partisipasi. Namun demikian, perubahan pola sosial juga mulai terlihat seiring dengan masuknya teknologi informasi dan pengaruh budaya luar, terutama pada kalangan generasi muda. Sebagian pemuda cenderung lebih individualis dan kurang terlibat dalam kegiatan sosial desa. Hal ini berpotensi melemahkan keberlanjutan modal sosial apabila tidak diimbangi dengan strategi penguatan peran pemuda dalam pembangunan desa.

Pilar Sosial Ekonomi

Secara sosial ekonomi, mayoritas penduduk Desa Srigonco menggantungkan hidup pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Komoditas pertanian seperti padi, jagung, dan hortikultura menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Selain itu, potensi perikanan air tawar serta peternakan sapi dan kambing juga cukup menjanjikan. Namun, hasil pemetaan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih tergolong sedang hingga rendah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses permodalan, rendahnya nilai tambah produk pertanian dan peternakan, serta lemahnya pemasaran hasil produksi. UMKM yang ada juga masih berskala kecil dan belum terintegrasi dengan jaringan pasar yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi desa masih sangat bergantung pada pengembangan kapasitas usaha dan dukungan kelembagaan ekonomi desa.

Pilar Pendidikan

Di bidang pendidikan, akses pendidikan dasar di Desa Srigonco relatif sudah terpenuhi, ditandai dengan keberadaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Namun, partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas dan perguruan tinggi masih tergolong rendah. Faktor ekonomi menjadi hambatan utama, di samping rendahnya motivasi melanjutkan pendidikan serta minimnya informasi tentang akses beasiswa. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia ini berdampak langsung terhadap rendahnya inovasi, produktivitas, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi desa secara optimal. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan.

Pilar Kesehatan

Pada sektor kesehatan, masyarakat Desa Srigonco telah memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar melalui puskesmas dan posyandu. Program kesehatan ibu dan anak serta imunisasi balita berjalan dengan cukup baik. Namun, masih ditemukan permasalahan terkait kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, sanitasi lingkungan, serta pencegahan penyakit tidak menular. Beberapa warga masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, terutama di wilayah dusun tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan edukasi kesehatan serta perbaikan infrastruktur dasar masih menjadi prioritas pembangunan desa.

Pilar Hukum

Kesadaran hukum masyarakat Desa Srigonco masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara, termasuk terkait legalitas usaha, administrasi kependudukan, serta penyelesaian sengketa secara hukum.

Sebagian besar permasalahan hukum masih diselesaikan secara informal melalui tokoh masyarakat atau perangkat desa. Meskipun pendekatan ini relatif efektif menjaga harmoni sosial, namun belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi hukum serta pendampingan hukum bagi masyarakat desa agar tercipta budaya hukum yang lebih baik dan berkeadilan.

Pilar Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di Desa Srigonco telah berjalan melalui berbagai program pemerintah desa, seperti pelatihan keterampilan, kelompok tani, serta kelompok usaha bersama. Namun, pelaksanaan program pemberdayaan masih bersifat sektoral, belum terintegrasi, dan cenderung bergantung pada bantuan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program juga masih perlu ditingkatkan. Rendahnya keberlanjutan program pemberdayaan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal perlu menjadi fokus utama agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dan mandiri.

Pilar Kewirausahaan (UMKM)

UMKM di Desa Srigonco berkembang di sektor makanan olahan, kerajinan, serta produk berbasis hasil pertanian dan perikanan. Namun, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam hal permodalan, pengemasan produk, perizinan usaha, serta pemasaran berbasis digital. Produk UMKM belum memiliki standar kualitas yang seragam dan belum terhubung dengan pasar yang lebih luas. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi desa juga belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM perlu didukung melalui pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, digitalisasi pemasaran, serta revitalisasi peran BUMDes.

Pilar Perempuan, Anak, dan Disabilitas

Kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas masih tergolong sebagai kelompok rentan dalam pembangunan desa. Peran perempuan dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan desa masih terbatas, meskipun secara potensial mereka memiliki peluang besar dalam pengembangan UMKM dan ekonomi rumah tangga. Perlindungan terhadap anak dan penyandang disabilitas juga masih memerlukan penguatan, terutama terkait akses pendidikan, kesehatan, serta ruang partisipasi sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya pembangunan desa yang responsif gender dan inklusif terhadap kelompok rentan.

Pilar Lingkungan dan Infrastruktur

Kondisi lingkungan dan infrastruktur Desa Srigonco menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan sampah, drainase, serta akses jalan desa. Beberapa ruas jalan masih memerlukan perbaikan untuk mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian dan mobilitas masyarakat. Selain itu, pengelolaan lingkungan belum sepenuhnya berbasis pada prinsip keberlanjutan, masih terdapat perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Padahal, Desa Srigonco memiliki potensi besar dalam pengembangan desa wisata yang sangat bergantung pada kualitas lingkungan dan infrastruktur.

Hasil pemetaan sosial di Desa Srigonco menunjukkan bahwa kekuatan utama desa terletak pada modal sosial masyarakat yang masih kuat, potensi sumber daya alam yang besar, serta dukungan pemerintah desa terhadap pembangunan partisipatif. Modal sosial berupa gotong royong, kepercayaan sosial, dan jaringan kelembagaan lokal merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat. Putnam (2000) menegaskan bahwa modal sosial berperan besar dalam meningkatkan kapasitas kolektif masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Mardikanto dan Soebiato (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh kekuatan modal sosial dan partisipasi warga.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kelemahan utama pembangunan Desa Srigonco terletak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya kelembagaan ekonomi desa, serta terbatasnya akses permodalan dan teknologi. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berdampak langsung terhadap rendahnya inovasi, produktivitas, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang. Tanpa peningkatan kapasitas manusia, potensi sumber daya alam yang besar tidak akan mampu dikonversi menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pada sektor ekonomi desa, temuan terkait lemahnya UMKM dan belum optimalnya peran BUMDes sejalan dengan hasil penelitian Suryanti dan Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa sebagian besar BUMDes di Indonesia masih menghadapi persoalan tata kelola, permodalan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Padahal, secara konseptual, BUMDes dirancang sebagai instrumen utama penggerak ekonomi desa dan sarana pengelolaan aset desa secara produktif (Kementerian Desa PDTT, 2021). Dengan demikian, revitalisasi peran BUMDes di Desa Srigonco menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Dari sisi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan, hasil pemetaan menunjukkan bahwa pembangunan Desa Srigonco masih menghadapi tantangan kesenjangan akses layanan dasar, khususnya bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Kondisi ini menguatkan temuan UNDP (2020) yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus menempatkan aspek inklusivitas sosial sebagai prinsip utama agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal (*no one left behind*). Pembangunan desa yang tidak responsif gender dan kelompok rentan berisiko memperdalam ketimpangan sosial di tingkat lokal.

Dalam konteks lingkungan dan infrastruktur, temuan terkait pengelolaan sampah, drainase, dan kualitas jalan desa menunjukkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan desa. Padahal, menurut WCED (1987), pembangunan berkelanjutan harus mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur desa di Desa Srigonco perlu diarahkan tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan analisis SWOT, peluang besar pembangunan Desa Srigonco terletak pada pengembangan desa wisata, penguatan UMKM berbasis potensi lokal, serta dukungan program pemerintah pusat dan daerah terhadap pembangunan desa berkelanjutan. Pengembangan desa wisata dinilai sangat relevan mengingat posisi strategis Desa Srigonco yang berada pada jalur wisata Pantai Balekambang. Hal ini sejalan dengan penelitian Hadiwijoyo (2018) yang menyatakan bahwa desa wisata mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal apabila dikelola secara partisipatif dan berkelanjutan.

Namun demikian, pembangunan Desa Srigonco juga menghadapi ancaman serius berupa persaingan pasar yang semakin ketat, perubahan iklim yang memengaruhi sektor pertanian dan perikanan, serta migrasi tenaga kerja muda ke luar daerah. Ancaman ini berpotensi melemahkan keberlanjutan pembangunan desa apabila tidak diantisipasi melalui strategi adaptif. Menurut IPCC (2021), perubahan iklim telah menjadi ancaman nyata bagi sektor pertanian global, termasuk di wilayah pedesaan Indonesia, sehingga dibutuhkan strategi mitigasi dan adaptasi berbasis lokal.

Dengan demikian, pembangunan desa berkelanjutan di Desa Srigonco membutuhkan strategi integratif yang mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan UMKM dan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa, peningkatan literasi hukum masyarakat, pemberdayaan kelompok perempuan dan disabilitas, serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Strategi tersebut sejalan dengan konsep pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan (Chambers, 2017; Suharto, 2018).

4. KESIMPULAN

Pemetaan sosial yang dilakukan di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sosial masyarakat, potensi desa, serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan desa berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap sembilan pilar utama, yaitu sosial budaya, sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan (UMKM), perempuan-anak-disabilitas, serta lingkungan dan infrastruktur, dapat disimpulkan bahwa Desa Srigonco memiliki potensi sumber daya alam dan modal sosial yang cukup besar sebagai dasar pengembangan ekonomi lokal dan penguatan pembangunan berbasis partisipasi. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal akibat berbagai kendala, terutama rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya kelembagaan ekonomi desa, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak utama ekonomi desa. Selain itu, masih terdapat persoalan pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan, serta pengelolaan lingkungan dan infrastruktur yang menunjukkan bahwa pembangunan desa belum sepenuhnya terintegrasi dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan. Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan utama Desa Srigonco terletak pada tingginya modal sosial masyarakat, dukungan pemerintah desa terhadap pembangunan, serta ketersediaan potensi ekonomi lokal yang beragam. Adapun peluang terbesar yang dapat dimanfaatkan adalah pengembangan desa wisata, penguatan UMKM berbasis potensi lokal, serta dukungan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan desa berkelanjutan. Sementara itu, tantangan dan ancaman yang perlu diantisipasi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, persaingan ekonomi yang semakin ketat, dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian dan perikanan, serta migrasi tenaga kerja usia produktif ke luar daerah.

Dengan demikian, pemetaan sosial terbukti menjadi instrumen strategis dalam menyediakan dasar perencanaan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran, partisipatif, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, revitalisasi peran BUMDes, penguatan UMKM, peningkatan literasi hukum masyarakat, pemberdayaan kelompok perempuan dan disabilitas, serta pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan keberlanjutan. Keseluruhan upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya Desa Srigonco sebagai desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Adi, I. R. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berbasis komunitas*. Bandung: Alfabeta.
- Bappenas. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Chambers, R. (2017). *Participatory workshops: A sourcebook of 21 sets of ideas and activities*. London: Earthscan.
- Hadiwijoyo, S. S. (2018). *Perencanaan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- IPCC. (2021). *Climate change 2021: The physical science basis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Indeks desa membangun 2021*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.
- Suharto, E. (2018). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

- Suryanti, Y., & Hidayat, M. (2021). Optimalisasi peran BUMDes dalam penguatan ekonomi desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 134–145.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). New York: Pearson.
- UNDP. (2020). *Human development report 2020*. New York: United Nations Development Programme.
- WCED. (1987). *Our common future*. Oxford: Oxford University Press.